

Dinsos Bogor Periksa Kejiwaan Pengemis di Gunung Salak

BOGOR (IM)- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Farid Ma'rif mengatakan, pihaknya tengah memeriksa kondisi kejiwaan Baliah, pengemis di Gunung Salak, Jawa Barat, yang videonya viral di media sosial.

Petugas juga telah berkomunikasi dengan keluarga Baliah di rumah Baliah yang berada di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. "Pertama, permasalahan itu sudah dikomunikasikan dengan keluarga. Jadi, keluarga juga sebetulnya merasa bertanggung jawab dengan hal ini," kata Farid saat diwawancarai di Bogor, Selasa (16/1).

"Kedua, dari kami itu sekarang sedang melakukan asesmen terhadap kondisi psikis, kejiwaan, hingga kondisi keluarganya. Nah, ini sedang dalam proses asesmen," kata Farid menambahkan.

Farid mengatakan, setelah hasilnya keluar, pihaknya baru bisa mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut. "Nanti hasilnya kita lihat, sehingga ini bisa mengarahkan kita untuk penanganannya kedepan harus seperti apa. Jadi, dipelajari dulu," terangnya.

Ketika ditanya mengenai temuan bahwa Baliah terpaksa mengemis karena kondisi ekonomi, Farid mengaku belum berani menyampaikan. "Nanti

tunggu hasil asesmen aja. Kalau laporannya sudah komprehensif, baru disampaikan. Kalau cuma informasi sih ada, baru sekedar informasi aja, tapi perlu laporan utuh," kata Farid.

Sementara, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengaku pihaknya sedang mengupayakan sejumlah langkah untuk menanggapi permasalahan tersebut. "Ya, langkah-langkahnya itu sudah dilakukan," kata Tosepu ditemui saat peninjauan Gudang Logistik Pemilu, KPU Kabupaten Bogor di wilayah Klapanunggal, Senin (15/1).

Sebelumnya diberitakan, Baliah, wanita pengemis di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi perbincangan di media sosial. Ini karena dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, saat mengemis, wanita ini mengucapkan kalimat 'Aa Kasihan Aa' dan 'Teh Kasihan Teh' dilengkapi dengan intonasi.

Baliah masuk ke dalam kategori keluarga tidak mampu. Hal ini yang membuat harus mengemis guna memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya sekolah anaknya. ● **gio**

Aliansi Aktivistis Jabar Bagikan Brosur Ajakan Pemilu Damai

BANDUNG (IM)- Aliansi Aktivistis Jabar melaksanakan kegiatan pembagian brosur ajakan Pemilu Damai kepada masyarakat Kota Bandung, pada Selasa 16 Januari 2024.

Ketua Umum Literasi Pemuda Berdikari (LPB), Indrajit Rai Ganbaldi mengatakan, sosialisasi Pemilu Damai yang digelar Aliansi Aktivistis Jabar di kawasan Braga Kota Bandung itu tak lain untuk menyukseskan Pilpres 2024.

"Teman-teman Aliansi Aktivistis Jabar sudah melakukan kajian, diskusi dan rombongan akan mengawal Pemilu Damai. Siapapun yang menang dan kalah, harus menerima hasilnya dengan lapang dada," kata Indrajit.

Ia menyebut, kegiatan sosialisasi Pemilu Damai yang digelar Aliansi Aktivistis Jabar itu melibatkan 20 universitas di Jabar. Kegiatan serua akan dilakukan secara masif di seluruh pelosok Jabar.

Sebab, menurutnya Pemilu Damai itu penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Terlebih, setiap pelaksanaan pesta demokrasi kerap berpotensi menimbulkan perselisihan di akar rumput masyarakat. "Harapan kita dengan gerakan hari ini adalah masyarakat dapat teredukasi dan terliterasi. Kita tidak mau ada masyarakat yang menang dan kalah, harus menerima hasilnya dengan lapang dada," ucapnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

GERAKAN PANGAN MURAH DI KOTA BOGOR

Warga membeli beras saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Kebon Kembang Blok F Trade Center, Kota Bogor, Jabar, Selasa (16/1). Badan Pangan Nasional bersama Pemkot Bogor menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menjual beras murah dengan harga Rp53 ribu per lima kg dengan tujuan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen sehingga tingkat inflasi dapat terjaga.

Walhi Jambi: Banjir Kerinci Indikator Rusaknya Wilayah Hulu

JAMBI (IM)- Kerinci adalah kabupaten di Provinsi Jambi yang berada di dataran tinggi. Kabupaten ini termasuk bagian hulu dari Provinsi Jambi. Banjir yang terjadi dari arah Jambi wilayah barat hingga beberapa kabupaten yang mengarah ke Kota Jambi menurut Walhi Jambi adalah tanda kerusakan lingkungan di hulu provinsi ini.

Dwi Nanto, Manajer Kajian Walhi Jambi mengatakan, jika ingin membuka tabir peristiwa banjir di Jambi maka diperlukan upaya pengumpulan fakta-fakta yang lengkap. "Tidak cukup peristiwa banjir hanya kita pahami dari semakin tingginya intensitas hujan." "Karena hujan itu menurunkan air dan tidak musti membawa banjir," kata dia saat ditemui pada Selasa (16/1).

Dwi mengatakan, secara topografi wilayah hulu Jambi ada Kerinci, Sungai Penuh, dan Merangin. "Itu semua adalah wilayah dataran tinggi yang secara alami memiliki fungsi serapan air khususnya bagi wilayah tengah dan hilir," katanya.

Namun, kondisi berubah hingga kerja alamnya pun akan berkurang. Dia mengatakan ada syarat-syarat wilayah hulu agar kerja alamnya stabil. "Namun yang utama dan penting adalah yang sangat memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah hulu." "Ini secara alami me-

yang sudah terbentuk dan tersusun, tumbuh, dan kembang disiapkan untuk dibentuk menjadi kesatuan yang akan menyebarkan siklus alam seperti musim panas dan hujan," kata dia.

"Banjir di wilayah hulu adalah tanda di mana daya dukung dan daya tampung sudah menurun di sana, dan ini pertanda buruk bagi wilayah tengah dan hilir," katanya.

Dwi menjelaskan, tanda buruk itu seakan ingin menyampaikan pesan bahwa hulu tak lagi mampu memastikan fungsi mengatur seperti biasanya. Sehingga, dengan cara tidak alami jumlah air yang tidak terkendali akan turun menuju tengah dan hilir.

"Wilayah tengah dan hilir saat ini sudah lama mengalami kerusakan sumber daya alam dan tidak bisa menerima jumlah air yang cukup besar," kata dia.

Indikator pembenahan RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi menurut Dwi seharusnya dibenahi. "Dan penegakkan hukum bagi semua pihak yang saat ini sedang mengakses lingkungan hidup di Jambi." "Khususnya pihak-pihak yang secara faktual di lapangan yang melakukan perusakan lingkungan dan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan wilayahnya," kata Dwi. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT DI DADAP TANGERANG

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Dadap, Kab. Tangerang, Banten, Selasa (16/1/202). Kementerian PUPR membangun tanggul sepanjang 1.664 meter di Pantai Dadap yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development sebagai upaya mengatasi banjir rob di daerah pesisir.

Mulyadi Siapkan 3 Opsi Solusi Masalah Lalu Lintas Truk Tambang di Parungpanjang

"Saya menawarkan tiga opsi di atas, dan meminta masalah lalu lintas kendaraan truk tambang segera diselesaikan karena masyarakat Parungpanjang dan sekitarnya sudah lama menderita," kata Anggota Komisi V DPR-RI, Mulyadi.

CIBINONG (IM)- Anggota Komisi V DPR-RI, Mulyadi menyiapkan tiga opsi solusi permasalahan lalu lintas kendaraan truk tambang di Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya.

Mulyadi menuturkan tiga opsi itu ialah pertama

merevitalisasi jalan eksisting, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya memperbaiki tetapi memperlebar.

Kedua, sambung Mulyadi, Pemerintah pusat menamakan modalnya untuk ikut dalam pem-

bangunan jalan khusus tambang dan ketiga rencana pembangunan jalan khusus tambang tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal itu dilakukan jika Konsorsium Pengusaha Tamban dan PT Jasa Sarana Jabar tidak bisa menyelesaikannya secara tepat waktu.

"Saya menawarkan tiga opsi di atas, dan meminta masalah lalu lintas kendaraan truk tambang segera diselesaikan karena masyarakat Parungpanjang dan sekitarnya sudah lama menderita," tuturnya kepada wartawan, Selasa (16/1).

Politisi Partai Gerindra ini melihat ada ketidak-

konsekuennya pemerintah dalam penegakan peraturan, apalagi pelanggaran peraturan terjadi karena diduga ada pungutan liar (Pungli) yang dipungut oleh oknum dari pengemudi truk tambang.

"Oleh karena itu, saya melihat yang bisa menggunakan 'tangan besi' dan menertibkan Pungli hanya pemerintah pusat. Saya cenderung, pemerintah pusat yang harus menyelesaikan masalah ini, dengan dibantu pemerintah daerah," tambahnya.

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan bahwa dirinya terus memperjuangkan dan mewujudkan

konsekuennya pemerintah dalam penegakan peraturan, apalagi pelanggaran peraturan terjadi karena diduga ada pungutan liar (Pungli) yang dipungut oleh oknum dari pengemudi truk tambang.

"Saya sudah membangun dua jembatan gantung di Kecamatan Jonggol, membangun jembatan gantung Ciseeng-Rumpin (Cisarum), asrama mahasiswa IAiJ La Roiba dan Universitas Juanda serta membangun Jalan Citeureup-Sukamakmur dan lainnya. "Saya sudah membangun dua jembatan gantung di Kecamatan Jonggol, membangun jembatan gantung Ciseeng-Rumpin (Cisarum), asrama mahasiswa IAiJ La Roiba dan Universitas Juanda serta membangun Jalan Citeureup-Sukamakmur. Mudah-mudahan di tahun politik ini, sesuai janji Presiden Joko Widodo saya bisa mewujudkan aspirasi lain dari masyarakat Kabupaten Bogor," jelas Mulyadi. ● **gio**

Pj. Bupati Bogor Pastikan Kertas Suara Terdistribusi Seluruhnya Lebih Cepat

BOGOR (IM)- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bersama Forkopimda meninjau langsung Gudang Logistik KPU, di Kecamatan Klapanunggal, Senin (15/1).

Usai melihat proses pelipatan surat suara, Asmawa Tosepu memastikan surat suara akan selesai didistribusikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yakni paling lambat tanggal 28 Januari 2024.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, bersama Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara, meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para petugas pelipat surat suara sekaligus melihat langsung proses pelipatan surat.

Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar, dan ditargetkan tanggal 28 Januari 2024 surat suara ini sudah terdistribusikan seluruhnya.

Meskipun secara ketentuan harus selesai terdistribusi pada H-7, namun KPU Kabupaten Bogor mengambil langkah inisiatif untuk lebih cepat dalam pendistribusian logistik, sehingga targetnya selesai paling lambat 28 Januari," ungkap Asmawa.

Asmawa berharap, proses yang sedang berjalan ini bisa lancar sehingga pesta

demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia dapat berlangsung dengan baik di Kabupaten Bogor. Ia menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang mendukung kelancaran terselenggaranya pesta demokrasi baik Pemilu Presiden dan Legislatif, di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten Bogor.

"Melihat proses yang ada, saya optimistis karena saat ini pun di tingkat kecamatan atau PPK sudah terdistribusi logistik untuk bilik suara dan alat coblos, tinggal menyusul surat suaranya," tandas Asmawa.

Asmawa menambahkan, selanjutnya bersama Forkopimda dan Komisioner KPU Kabupaten Bogor meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para petugas yang melaksanakan tugas melipat surat suara, di gudang logistik KPU Kabupaten Bogor.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Bogor, Dandim Bogor, para petugas kesehatan dari Puskesmas yang hari ini memberikan kontribusi layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para petugas pelipat surat suara," katanya.

Ia melanjutkan, sementara keluhan yang ada dari beberapa petugas, karena kerjanya duduk sepanjang waktu jadi

mengalami pegal-pegal.

Hal tersebut sudah ditangani para petugas kesehatan dari Polres, Kodim, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan diberikan vitamin yang bisa mengurangi keluhan tersebut. Untuk kendala lainnya tidak ada, selama ini proses pelipatan suara sudah berjalan dengan lancar.

"Kita lihat cuaca sekarang sudah ada hujan yang besar, cuaca yang berubah-ubah dan itu kami pikirkan agar kami bisa melaksanakan pengawalan hingga sampai tujuan. Pasca dari pencoblosan kita juga akan mengawal sampai ke tempat yang sudah ditentukan oleh KPU," jelas AKBP Rio.

AKBP Rio berpesan kepada masyarakat, mari ciptakan Pemilu yang damai, sehingga kita sama-sama menjaga situasi ini. Jadi bukan hanya tugas aparat keamanan, TNI dan kepala daerah, namun seluruh lapisan masyarakat kami minta peran sertanya untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Hadir mendampingi Pj Bupati dalam peninjauan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan, dan Camat Klapanunggal. ● **gio**



IST

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengecek gudang logistik KPU dan memastikan kertas suara terdistribusi lebih cepat.

REVITALISASI TERUS DITUNDA

Pengelola Terminal Bubulak Putar Otak Perbaiki Fasilitas

BOGOR (IM)- Pengelola Terminal Bubulak, Kota Bogor, memutar otak untuk memperbaiki sementara fasilitas terminal. Sebab, rencana revitalisasi Terminal Bubulak sejak 2019 terus tertunda akibat pandemi Covid-19 dan Pemilu 2024.

Kepala Terminal Bubulak, Sumardono mengatakan, sambil menunggu revitalisasi, pihaknya membuat koperasi untuk melakukan perbaikan sementara. Pengelola memilih membuat koperasi agar tak dikira melakukan pungutan liar (pungli).

"Kalau terminal hanya mengandalkan anggaran (dari pemkot), bagaimana terminal bisa rapi," ucap Sumardono, Selasa (16/1). "Saya harus mencari investor agar terikat dengan terminal dan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari, maka harus ada badan hukum. Saya berpikir saat itu membuat koperasi, karena koperasi itu kan sifatnya menengah ke bawah, UMKM," imbuh dia.

Pengelola terminal dan pihak koperasi kemudian membangun toilet dan mushala sejak 2019 agar penumpang merasa lebih nyaman.

Tak hanya itu, koperasi juga menambal jalan rusak (patching aspal) di sejumlah titik dan mengecor sebagian jalan. Jalan berlubang juga diurus. Koperasi juga membangun kios-kios di area depan terminal. Kini kios-kios itu mulai diisi para pedagang.

"Saya minta Pak Cecep (pihak koperasi), saya bilang, 'Pak Cecep, bantu saya merapikan terminal', hasilnya bisa dilihat di depan itu kios-

kios," tutur Sumardono.

"Beliau (pihak koperasi) yang merintis dengan saya. Saya menggandeng orang-orang yang punya duit, sok, silakan 'bermain' di terminal, tetapi pakai aturan main. Jangan sampai memberatkan orang-orang di terminal, khususnya pengusaha kecil," tambah dia.

Dengan berbagai usaha ini, Sumardono berharap Terminal Bubulak bisa kembali ramai penumpang. Adapun kondisi Terminal Bubulak tampak tidak terawat. Berdasarkan pantauan, Senin (15/1), terminal terlihat kumuh karena sampah berserakan. Aroma tak sedap sesekali tercium. Selain itu, tidak terlihat tempat tunggu penumpang.

Jalan masuk dari arah terikat dengan terminal dan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari, maka harus ada badan hukum. Saya berpikir saat itu membuat koperasi, karena koperasi itu kan sifatnya menengah ke bawah, UMKM," imbuh dia.

Menurut Sumardono, Terminal Bubulak seharusnya direvitalisasi beberapa tahun lalu. Namun, revitalisasi terminal tertunda akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Kemudian, pada 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor mengukur jalan di area Terminal Bubulak sebagai bagian dari rencana revitalisasi. Saat itu, Pemkot Bogor menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk merenovasi Terminal Bubulak. Namun, lagi-lagi Terminal Bubulak gagal direvitalisasi karena adanya Pemilu 2024. ● **jai**